

MASALAH, ANALISIS, DAN INTERVENSI KOMUNITAS MISKIN DI PERKOTAAN: STUDI KASUS KOMUNITAS MISKIN DI DEPOK

Laurike Moeliono

Fakultas Psikologi
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta

laurike.moeliono@atmajaya.ac.id

ABSTRACT

This article gives a picture of a poor community in Depok : poverty as something given, their problem with poverty, how poverty is given meaning, how poverty can be analysed using certain models of social analyses, and what kind of social intervention is appropriate related to the problem and need of this poor community who is experiencing the so-called powerlessness.

Key words: poverty, poor community, social analyses, social intervention

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah sebuah fenomena sosial yang dibicarakan di berbagai tingkat, dari presiden, politisi, wakil rakyat, pengusaha, kaum berada, hingga kaum papa. Setiap orang membicarakan kemiskinan dengan caranya sendiri-sendiri. Cara membicarakan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh sudut pandang dan pengalaman yang menyangkut kemiskinan. Dengan menggunakan indikator-indikator tertentu dan kaidah-kaidah statistik tertentu, BPS melaporkan bahwa pada tahun 2008 jumlah orang miskin di Indonesia di bawah 30%, sedangkan para sarjana ekonomi yang menggunakan indikator lain menyatakan orang miskin di Indonesia masih di atas 50%. Banyak orang yang "berkecukupan" mengatakan dirinya masih "miskin" dan karena itu masih perlu terus menambah kekayaan. Banyak orang yang berdasarkan pandangan orang lain dianggap sudah sangat kaya raya ternyata masih merasa "miskin" karena belum masuk dalam daftar orang terkaya. Ada pula orang-orang yang hidupnya "cukup" sebagai pegawai negeri dengan gaji Rp3.000.000,00/bulan dan dua anak yang bersekolah di sekolah negeri, tetapi merasa "tidak miskin sama sekali".

Dalam penelitian di komunitas pemulung ada orang yang bekerja serabutan, kadang kerja kadang tidak, kadang kerja sebagai pemulung, kadang sebagai penjual arumanis keliling, mempunyai tujuh anak dari dua istri dan tidak merasa "miskin-miskin amat". Tinggal di rumah kontrakan berukuran 5 x 8 meter, berlantai tanah ditutup plastik, berdinding setengah kayu setengah bilik, beratap seng dan tambalan

papan-papan dengan tumpukan batu agar seng tidak terbang. Buang air besar di kakus-kakus "helikopter" yang terbuat dari papan bekas yang hanya menutupi badan ketika yang bersangkutan jongkok, ditutup dengan tutup kain bekas spanduk di atas kali adalah kehidupan harian yang "biasa". Mereka tidak merasa miskin dibanding orang yang dianggap lebih miskin, seperti para gelandangan yang tidur di emperan toko dan mal di Depok. Makan nasi dengan indomi (satu dus satu minggu satu keluarga) dan kadang-kadang mencoba ayam atau ikan dari pasar bukan soal kurang mampu, melainkan sebuah pilihan paling mudah dan enak. Demikian juga kehidupan sebagai pemulung yang harus bekerja siang dan malam untuk mengumpulkan rongsokan dari jalanan, pasar, dan tempat-tempat sampah di gang-gang perumahan Depok merupakan hal yang "*sudah seharusnya dijalani kalau mau biayain sekolah anak di kampung*" -- menurut beberapa pemulung yang rutin mengirimkan uang ke kampung asal mereka. Ketika tidak dapat menjalani hidup yang lebih baik, hidup yang sedang dijalani "*dinikmati ajalah,*" seperti kata sebagian warga. Tampak bahwa orang miskin mempunyai pandangan dan penilaian sendiri mengenai kemiskinan. Kemiskinan adalah sesuatu yang relatif tergantung pada siapa yang membicarakan, siapa yang mengalaminya, dan bagaimana ia atau masyarakat tempat ia hidup memaknai kemiskinan itu.

Penelitian ini menggambarkan kehidupan orang miskin dan bagaimana mereka menjalani kemiskinannya. Tulisan ini dibuat berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di sebuah komunitas "miskin" di Depok selama tiga bulan (Januari-April 2008). Jumlah anggota komunitas itu sekitar 250 orang, yang merupakan anggota dari sekitar delapan puluh kepala keluarga. Penelitian ini adalah bagian dari survei untuk mengetahui keadaan sosial-ekonomi masyarakat "miskin". Berdasarkan survei tersebut, dipikirkan, direncanakan, serta dilaksanakan intervensi yang tepat untuk dilakukan di dalam komunitas tersebut. Tulisan ini menggambarkan sebagian kecil dari temuan penelitian tersebut, yaitu gambaran kemiskinan sebuah komunitas miskin di perkotaan, bagaimana kemiskinan dimaknai, analisis terhadap budaya kemiskinan, model analisis sosial terhadap kemiskinan, serta sebuah usulan intervensi.

METODE PENELITIAN

Metode kuantitatif dan kualitatif diterapkan untuk memperoleh data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan survei yang menggunakan kuesioner, wawancara mendalam, diskusi kelompok, dan observasi. Survei dengan kuesioner dilakukan terhadap seluruh rumah tangga yang terdaftar sebagai anggota komunitas (bapak atau ibu) sebanyak delapan puluh kepala keluarga. Selama survei juga dilakukan wawancara mendalam untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam di luar pertanyaan-pertanyaan tertutup di dalam kuesioner. Selanjutnya, dilakukan wawancara mendalam terhadap sekitar lima belas warga (bapak dan ibu) yang sebagian dipilih secara purposif (tokoh masyarakat, orang yang disegani, dan orang yang dianggap penghuni paling lama) dan sebagian sambil lalu (*convenient*). Diskusi kelompok dilakukan dengan dua kelompok, yaitu kelompok bapak-bapak dan ibu-

ibu. Observasi dilakukan selama penelitian berlangsung terhadap kehidupan sehari-hari warga komunitas.

HASIL

Komunitas dalam penelitian ini tinggal di atas tanah hak milik Pak Bahar (almarhum) yang dikelola oleh seorang anak laki-laki dari almarhum. Tanah tersebut terletak di Kelurahan Abadi Jaya Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Mengikuti nama mushola Al Bahar, maka komunitas penelitian ini kemudian disebut komunitas Al Bahar. Komunitas ini tinggal di atas sebuah lahan luas yang terbagi menjadi dua bagian karena dipisahkan oleh jalan setapak, yaitu bagian depan dan bagian belakang.



Jumlah penduduk di bagian depan dan belakang kurang lebih sama, yaitu sekitar empat puluh kepala keluarga.

Warga tinggal di rumah-rumah kontrakan berupa bangunan bilik dan kayu atau bangunan setengah tembok berukuran 5 x 10 meter dengan lantai semen atau tanah yang ditutupi karpet plastik. Rumah hanya terdiri dari satu ruangan yang oleh sebagian warga disekat untuk kamar tidur. Rumah satu dengan rumah lainnya menempel sehingga suara radio dan TV dari tetangga dapat terdengar dengan

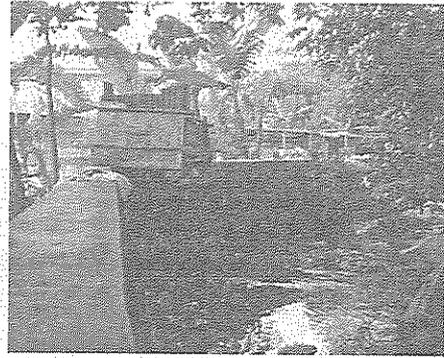
sangat jelas. Komunitas ini hidup di rumah-rumah kecil di atas tanah yang disewa. Setiap kepala keluarga menyewa satu rumah dan membayar antara Rp60.000,00–Rp75.000,00 per bulan kepada pemilik tanah melalui seorang pengurus kontrakan yang ditunjuk oleh pemilik lahan. Besarnya tarif kontrakan ditentukan sepihak oleh pemilik lahan, dan setiap tahun naik sekitar 5%–10%. Uang sewa harus disetor pada awal bulan kepada pengurus kontrakan. Bila terlambat, memang tidak ada sanksi, tetapi ada kemungkinan orang yang terus menunggak suatu hari akan diusir ketika ada pengontrak baru.

Lingkungan perumahan warga terlihat kumuh karena banyak tumpukan barang rongsokan yang dikumpulkan para pemulung di depan rumah-rumah mereka. Rumah para pedagang kecil yang tidak bekerja sebagai pemulung terlihat lebih bersih. Namun, tanah lembab dan becek yang banyak ditutupi sampah plastik memberi kesan kotor. Tanah becek dengan selokan-selokan yang penuh sampah dan tumpukan barang menjadi sarang nyamuk penyebab berbagai penyakit, seperti demam berdarah dan cikungunya yang



pernah mewabah di kampung ini.

Ada enam sumur umum yang dipakai warga untuk keperluan mandi, cuci, dan kakus. Dengan ember berisi air yang diambil dari sumur, warga membuang air besar di kakus-kakus gantung yang terletak di atas sungai. Sungai kecil yang mengalir di pinggir kampung menampung berbagai kotoran lain, seperti sampah warga. Dengan ember yang dipakai warga ke kakus, warga juga mengambil air untuk mandi dan mencuci. Hal itu merupakan salah satu penyebab tercemarnya sumur-sumur umum di wilayah ini oleh bakteri *E-coli*. Jarak antara tempat mandi dan cuci (termasuk mencuci popok bayi) dan sumber air (sumur) sangat dekat sehingga menjadi salah satu alasan lain kemungkinan air sumur tercemar. Untuk masak dan minum, warga membeli dari pedagang air. Untuk masak warga membeli air jerigen yang dibawa pedagang keliling ke dalam kampung, sedangkan untuk minum, warga membeli air isi ulang dalam kemasan. Warga mengeluarkan sekitar 10% dari pendapatan rumah tangganya untuk membeli air yang sebetulnya tersedia berlimpah di dalam kampung.



Penghuni umumnya berasal dari berbagai daerah asal di Jawa Tengah, seperti Brebes, Tegal, Klaten, dan Jawa Timur, seperti Bojonegoro. Mereka datang sebagai migran yang umumnya masih memegang KTP daerah asal. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa mereka tinggal di Depok sebagai penduduk ilegal. Mereka tidak mengurus KTP Depok karena terlebih dulu harus meminta surat pindah dari daerah asal. Mereka sama sekali tidak ingin meninggalkan daerah asal karena keterikatan pada daerah asal masih sangat kuat; bahkan, sebagian dari mereka sengaja meninggalkan anggota keluarganya di kampung halaman. Keberadaan mereka di Depok dan Jakarta hanya untuk mencari nafkah.

Pekerjaan penduduk, antara lain pemulung (49,2%), pedagang kecil (rujak tumbuk, bakso tusuk, ketoprak, sayur, dan otak-otak bakar) (17,4%), sisanya buruh, tukang becak, supir angkot. Di bagian depan lebih banyak pedagang, sementara di bagian belakang lebih banyak pemulung. Banyak juga warga yang berprofesi ganda sebagai pedagang sekaligus pemulung: pagi berjualan, sedangkan siang, sore, atau malam memulung. Pekerjaan sebagai pemulung biasanya dilakukan dalam dua *shift*, yaitu pagi-siang dan sore-malam, dengan total jam kerja 6-8 jam/hari. Biasanya hasil memulung dikumpulkan atau disimpan dulu. Setelah dirasa cukup banyak (misalnya 2-3 karung), diserahkan kepada "bos pemulung" untuk ditimbang dan dibayar. Ada empat bos pemulung yang tinggal di kampung ini dan menampung barang-barang dari para pemulung. Setiap bos pemulung mempunyai sejumlah "anak buah" sendiri. Pola hubungan antara bos dan bawahan berupa hubungan "patron-client," yaitu bos dapat menjadi atasan, pengambil keputusan, tetapi juga *support system* bagi anak buahnya. Barang-barang bekas yang dikumpulkan terdiri dari botol/gelas bekas air mineral, kertas, kardus, atau dupleks.

Pendapatan rata-rata sebagai pemulung antara Rp500.000,00–Rp1.500.000,00 per bulan. Bahkan, ada sepasang suami-istri pemulung yang dapat memperoleh sekitar Rp4.000.000,00/bulan. Demikian juga pendapatan sebagai pedagang kecil berkisar antara Rp500.000,00–Rp1.500.000,00 per bulan. Secara sederhana, komunitas membagi tiga pengeluaran untuk keperluan berikut:

- a. konsumsi sehari-hari +/- Rp500.000,00
- b. pendidikan anak (yang ada di kampung) +/- Rp500.000,00
- c. rokok dan jajan anak +/- Rp500.000,00

Kebanyakan mengatakan tidak menabung, tetapi dari hasil wawancara mendalam terbukti sebagian warga mempunyai beberapa bentuk “tabungan” yang tidak disebut sebagai “tabungan”, seperti rumah di kampung, lahan kebun/sawah kecil di kampung, motor, atau TV di kampung, pendidikan anak-anak di kampung. Banyak juga warga yang tidak dapat menabung karena menghabiskan penghasilannya untuk kehidupan sehari-hari. Besarnya biaya rokok dan jajan tidak dianggap pemborosan.

PEMBAHASAN

Budaya Kemiskinan

Banyak antropolog dan ilmuwan sosial sudah mengkaji masyarakat kota, seperti komunitas Al Bahar, dari berbagai disiplin ilmu masing-masing. Seringkali konsep budaya kemiskinan (*culture of poverty*), seperti yang pertama kali dikemukakan oleh antropolog bernama Oscar Lewis (1988), digunakan sebagai acuan untuk menjelaskan gejala kemiskinan masyarakat kota. Konsep budaya kemiskinan menjelaskan mengapa kemiskinan seringkali lestari dan menetap atau berputar dalam lingkaran tertutup. Menurut Lewis, budaya kemiskinan adalah suatu adaptasi dan reaksi orang miskin terhadap posisi marginal mereka dalam suatu masyarakat yang terstratifikasi di dalam kelas-kelas. Kemiskinan menetap karena adanya pola-pola sosialisasi di dalam keluarga atau komunitas yang berfungsi sebagai mekanisme adaptif terhadap lingkungan kemiskinan yang dihadapi sehari-hari; dengan kata lain, sebuah usaha untuk menanggulangi keputusasaan. Pola budaya itu terus dikembangkan sebagai reaksi terhadap budaya “luar” atau budaya “dominan” yang menekan mereka.

Orang miskin seringkali menginternalisasikan pandangan orang lain terhadap diri mereka sehingga orang miskin percaya dan kemudian melihat diri mereka sendiri dengan kaca mata orang berkuasa (orang *kaya*). Inilah yang disebut *self fulfilling prophecy*, percaya dan menginternalisasikan apa yang dikatakan orang lain mengenai dirinya (Freire 1972). Inilah yang disebut penjajahan budaya. Mengapa bertahun-tahun warga komunitas Al Bahar tetap bertahan dalam pola hidup miskin yang menindas seperti yang digambarkan di atas? Rupanya hal itu masih dapat dijelaskan dengan teori kebudayaan kemiskinan Oscar Lewis tahun 1959-an. Secara umum dapat dikatakan bahwa komunitas Al Bahar hidup dalam lingkaran kemiskinan

karena percaya bahwa mereka adalah orang-orang miskin, percaya bahwa sulit keluar dari lingkaran kemiskinan, dan percaya bahwa kemiskinan adalah sebuah "takdir".

Untunglah ada beberapa anggota komunitas yang tidak begitu saja "menerima takdir" kemiskinan dan berjuang untuk memperbaiki kehidupan dengan menabung, menyekolahkan anak-anak di kampung, membeli tanah dan rumah di kampung untuk masa depan. Sayangnya, segelintir orang tersebut tidak muncul sebagai motivator bagi kebanyakan warga lainnya.

Dominasi-Subordinasi

Kemiskinan berkaitan dengan kepasrahan dan posisi tawar yang lemah. Ketika warga pengontrak menuntut fasilitas umum yang memadai, seperti masjid atau sumber air bersih, pemilik kontrakan dapat saja bersikap tidak peduli. Akibatnya, warga sendiri yang harus memenuhi tuntutan-tuntutannya. Demikian pula ketika ada permintaan dari pihak pemilik lahan pada warga untuk mengerjakan sesuatu dan warga tersebut menolak, maka yang bersangkutan terancam terusir. Komunitas hanya mampu mengeluh, tetapi tidak ada yang berani bertindak karena takut diusir dari tempatnya. Hal itu menunjukkan kuatnya dominasi satu pihak terhadap pihak lainnya, yang selanjutnya menyebabkan posisi tawar warga sangat rendah terhadap pemilik lahan. Hubungan dominasi dan subordinasi akhirnya berbentuk hubungan penindasan: pihak dominan dapat berlaku sewenang-wenang dan mengusir warga yang dianggap tidak berkenan. Hubungan dehumanisasi yang tidak seimbang itu juga terjadi antara komunitas yang diberi stigma ilegal (tanpa KTP setempat) dan pihak pemerintah daerah yang hanya melanggengkan ketidakadilan dan menempatkan orang-orang dengan budaya miskin sebagai komunitas pinggir. Komunitas ilegal tersebut tentunya tidak mudah mengakses layanan publik yang baik, seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial lainnya. Posisi tawar yang lemah terhadap berbagai pihak dominan seolah-olah lestari karena tidak ada warga yang berani mengubah. Warga terkungkung oleh budaya bisu (Freire 1972) dan ketidakberdayaan (*powerlessness*) menghadapi kesewenang-wenangan tersebut.

Kumpulan warga penghuni lahan itu adalah warga "ilegal" menurut perspektif pemerintah karena tidak memiliki KTP lokal, tidak memiliki kartu keluarga wilayah tersebut, dan "menumpang" di lahan orang lain. Komunitas itu bahkan tidak mempunyai ketua RT karena belum membentuk RT versi pemerintah. Pengurus kontrakan tidak dapat dianggap "corong" untuk menyampaikan aspirasi karena merupakan "perpanjangan tangan" pemilik lahan yang mendapat bagian dari upayanya menagih dan mengelola uang kontrakan. Subordinasi warga terhadap pemilik lahan mengakibatkan warga pasrah dan menerima nasib sebagai "penumpang" dengan berbagai kewajiban, tetapi tanpa hak-hak setimpai. Kemiskinan dan stratifikasi sosial yang rendah telah menghilangkan hak-hak mereka sebagai warga negara.

Analisis Sosial terhadap Kemiskinan

Ada dua model analisis yang dapat dipakai untuk memahami kemiskinan komunitas Al Bahar. Berdasarkan hal itu kemudian direncanakan intervensi yang

menjadi lebih kecil mengingat suara yang disampaikan adalah suara kelompok, dan bukan suara perseorangan. Suara kelompok yang kuat akan mengimbangi kekuatan (dominasi) pihak pemilik lahan atau pengurus kontrakan. Posisi tawar yang lebih kuat akan menjadi bekal bernegosiasi dengan pihak dominan. Seluruh proses penyadaran dan pengorganisasian ini tentu membutuhkan peran seorang fasilitator atau mediator dari luar. Di sinilah peran penting seorang intervensionis.

PUSTAKA ACUAN

- Fox, D. dan I. Prilleltensky (Ed.). 1997. *Critical Psychology: An Introduction*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. [Http: www.dennisfox.net/critpsy/book.html](http://www.dennisfox.net/critpsy/book.html).
- Freire, P. 1972. *Pendidikan Kaum Tertindas (Pedagogy of Oppressed)*. Jakarta: LP3ES.
- Lewis, Oscar. 1988. *Kisah Lima Keluarga. Telaah-Telaah Kasus Orang Meksiko dalam Kebudayaan Kemiskinan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moeliono, L. dan A. Anggal. 2003. *Penelitian Praksis Partisipatif: Pedoman Pelaksanaan dan Manual Pelatihan (Dengan Ilustrasi Penelitian Praksis Partisipatif Kesehatan Reproduksi Remaja)*. Laporan Penelitian PKPM-Atma Jaya. Jakarta.
- Nelson, G. dan I. Prilleltensky. 2005. *Community Psychology: In Pursuit of Liberation and Well Being*. New York: Palgrave Macmillan.
- Suryawasita, S.J. 1987. Dalam Banawiratma, J.B.Sj. *Kemiskinan dan Pembebasan*. Jakarta: Kanisius.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tulisan ini mengacu pada hasil penelitian bersama kelompok intervensi sosial Fakultas Psikologi Universitas Indonesia angkatan 2006. Penulis berterima kasih kepada Dian, Elis, Erika, Vemmy, Ade, Wisda, dan Liza yang telah menyumbangkan ide-idenya kepada penulis.